



Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Lama Jabatan Kepala Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah

Wijita Lutvitasari

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Suabaya, Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: wijita.21036@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This study was conducted to determine whether there is an influence of the quality of financial reports, the length of office of the regional head and the size of the regional government on the transparency of the regional government through. The sampling technique used purposive sampling consisting of all regional governments in Indonesia in 2023 with a sample size of 517 regional governments. Based on the statistical tests that have been carried out, the results of this study indicate that the quality of financial reports and the size of the regional government have an effect on the transparency of the regional government through the website. Meanwhile, the length of office of the regional head does not affect the transparency of the regional government through the website.*

Keywords: *Length of Office, Quality of Financial Reports, Size of Government, Transparency, Website.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari kualitas laporan keuangan, lama jabatan kepala daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah melalui. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2023 dengan jumlah sampel 517 pemerintah daerah. Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan kualitas laporan keuangan dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website. Sedangkan lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Lama Jabatan, Transparansi, Ukuran Pemerintah, Website.

1. LATAR BELAKANG

Transparansi merupakan isu yang telah menjadi perhatian serius dalam pemerintahan yang demokratis. Transparansi merupakan salah satu dari prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sektor publik (Adiputra et al., 2018). Adanya transparansi publik ini menjadi suatu cara bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual, dimana dengan informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui perbandingan antara kinerja keuangan yang telah dicapai dengan yang direncanakan (Novalia & Deviani, 2023). Indonesia terus mengalami tantangan yang serius dalam melawan tindak korupsi. Hal ini didukung berdasarkan hasil dari *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 yang menyatakan bahwa skor CPI pada tahun 2023 mengalami penurunan dari skor 40 pada tahun 2019 dimana skor ini merupakan skor tertinggi yang diterima Indonesia yang mengalami penurunan di angka 34 pada tahun 2023 (Transparency International Indonesia, 2023). Hal ini membuktikan bahwa tindakan korupsi di Indonesia saat

ini mengalami peningkatan dan relatif tinggi. Salah satu faktor penyebab yang melatarbelakangi tindakan korupsi ini yaitu rendahnya pelaksanaan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (Pradita, 2019). Oleh karena itu dengan adanya transparansi ini menjadi salah satu cara dalam mencegah adanya tindak korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat (Yuliani, 2017). Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan harus memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Taufik & Bandi, 2015). Saat ini di Indonesia, hampir seluruh Pemerintah Daerah telah memiliki website resminya masing-masing (Yuliani, 2017). Namun meskipun demikian, masih ada beberapa pemda hingga saat ini yang belum memanfaatkan website tersebut secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Mutmainnah et al., (2023) menyatakan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam peningkatan transparansi anggaran yang tersedia di situs web pemda. Dari penelitian menunjukkan informasi terkait ketersediaan dokumen anggaran pada website pemda masih rendah dimana pada tahun 2020 pemerintah provinsi yang mengungkapkan dokumen secara lengkap hanya 5, sedangkan yang tidak lengkap dalam mempublikasikan dokumen anggaran sebanyak 13 dan yang tidak mempublikasikan dokumen anggaran sama sekali pada website resminya terdapat 16 pemerintah provinsi.

Kualitas laporan keuangan berhubungan dengan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK merupakan Lembaga yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan audit. Pada tahun 2015, Standar Akuntansi Keuangan berbasis akrual telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Penerapan standar ini bertujuan agar kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Namun, berdasarkan BPK RI (2021), selama periode 2016 hingga 2022 dimana sejak standar akuntansi berbasis akrual diterapkan, beberapa pemerintah daerah masih ada yang belum memperoleh opini WTP. Kualitas laporan keuangan yang rendah ini memicu rasa curiga dan tidak percaya dari masyarakat kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Selain itu, laporan keuangan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan informasi yang disajikan tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan karena hal ini dapat memberikan keputusan yang buruk dan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pemda diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan mencapai transparansi (Nosihana & Yaya, 2016).

Berdasarkan Adiputra et al., (2018); Nor et al., (2019); dan Nurhadianto & Sugiri, (2022) dalam hasil penelitiannya menunjukkan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Novananda et al., (2021); Yustikasari, (2018); dan Ningsih, (2018) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

Kepala daerah merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu daerah yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola pemerintah daerah. Masa jabatan mengacu pada lama waktu yang dihabiskan seseorang untuk memegang posisi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Kepala daerah dalam mengambil keputusan cenderung memikirkan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Kepala daerah yang memegang jabatan lama akan lebih memahami bagaimana sistem kerja pemerintah daerah, sehingga dapat menemui celah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi tanpa mengurangi kinerjanya. Berdasarkan penelitian Pranaswati & Kiswanto, (2020), (2020) dan Gabriel & Castillo, (2020) hasil penelitiannya menunjukkan lama jabatan kepala daerah tidak memengaruhi tingkat transparansi Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Tavares & da Cruz, (2017) lama jabatan berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah yaitu besar kecilnya pemerintahan dalam suatu daerah. Pada penelitian Ningsih, (2018) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat dinilai dari total aset suatu daerah. Ukuran pemerintah daerah yang lebih besar dianggap memiliki sumber daya yang lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran pemerintah yang lebih kecil (Firmansyah et al., 2022). Ketika total asset semakin besar, maka tanggungjawab pemda dalam mengungkapkan hasil pengelolaan keuangan kepada masyarakat juga semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novananda et al., (2021) dan Novalia & Deviani, (2023) menunjukkan bahwa Ukuran pemerintah daerah mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Sedangkan untuk ukuran pemerintah daerah yang tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah telah dilakukan oleh Yudistira, (2022); (Dewi & Purwanto, 2022); (Lestari & Rahardjo, 2020); dan Ningsih, (2018).

Berdasarkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian di atas dan fenomena yang terjadi mengenai faktor yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Lama Jabatan Kepala Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling, (1976), teori agensi yaitu hubungan yang muncul atas dasar perjanjian yang antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan kepercayaan dan agen sebagai penerima tanggungjawab dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan sesuai kepentingan principal. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan adanya *agency problem* yang berupa asimetri informasi. Berdasarkan teori agensi terjadinya asimetri informasi dikarenakan pemerintah memiliki informasi sumber daya daerah lebih banyak daripada masyarakat (Cinintya et al., 2022). Berdasarkan teori agensi, hubungan principal dan agen harus menggunakan informasi yang efisien agar dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi (Novananda et al., 2021).

Pemerintah daerah memiliki informasi lebih lengkap terkait sumber daya daerah dibanding masyarakat. Jika asimetri informasi ini terlalu besar maka dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sehingga dengan menyampaikan informasi yang jujur dapat meminimalkan terjadinya *agency problem*. Begitu pula dengan masa jabatan kepala daerah yang panjang memberikan peluang kepala daerah menyalahgunakan wewenang karena kepala daerah memiliki informasi banyak terkait pemerintah daerah. Adanya transparansi dapat meminimalisir terjadinya permasalahan karena masyarakat dapat mengawasi pemerintah daerah melalui laporan yang dipublikasi. Berdasarkan teori agensi, aset daerah yang besar menyebabkan masyarakat harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan karena khawatir akan terjadinya korupsi. Dalam upaya mengurangi asimetri informasi terhadap tuntutan dari masyarakat, pemerintah daerah perlu melakukan transparansi secara lengkap. Ukuran pemerintah daerah yang besar memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah serta tuntutan yang lebih besar dari masyarakat (Handayani et al., 2022).

Teori Sinyal

Teori sinyal pertama kali ditemukan oleh Spence Michael, (1973) yang menyatakan bahwa pemilik informasi (agen) memberikan sinyal kepada penerima (principal) berupa laporan keuangan. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah yang mendapat wewenang dari masyarakat berusaha menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Sinyal berupa informasi baik yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah ini bertujuan agar masyarakat dapat selalu memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah

daerah dapat berjalan baik (Verawaty, 2017). Menurut Yustikasari, (2018) sinyal yang disampaikan pemerintah yaitu informasi berupa laporan keuangan yang berkualitas, sistem pengendalian internal yang meningkat, keterbukaan informasi yang lengkap dan informasi yang detail di website (A. D. Astuti, 2020). *Signalling theory* berfungsi mengurangi asimetri informasi. Terjadinya asimetri informasi ditimbulkan karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi internal daerah dibanding masyarakat.

Menurut *signalling theory*, di dalam penelitian ini, sinyal informasi yang diberikan agen kepada principal yaitu berupa laporan keuangan (Yustikasari, 2018). Pemerintah daerah yang telah melaksanakan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan mendapatkan opini terbaik yaitu WTP, maka ini dapat dijadikan sinyal yang baik untuk masyarakat. Dengan diterimanya opini terbaik dari BPK ini, pemerintah dapat membuktikan bahwa pemda telah melakukan kinerja dengan baik dalam pengelolaan laporan keuangan. Ukuran pemerintah daerah jika dikaitkan dengan *signalling theory*, pemerintah daerah dengan asset yang besar akan mendapatkan dorongan untuk melakukan transparansi lebih besar kepada masyarakat (Rosalia & Zulkarnain, 2020). Pemerintah daerah memberikan sinyal kepada masyarakat berupa informasi yang lengkap sebagai sinyal bahwa pemerintah daerah telah mengelola asset daerah tersebut dengan baik.

Transparansi

Definisi transparansi menurut Mardiasmo, (2006) yaitu keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan terkait dengan kinerja pemerintah yang diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Firmansyah et al., 2022). Transparansi merupakan konsep yang berhubungan dengan tersedianya informasi yang dapat dijangkau dan dipergunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan (Araujo & Tejedro-Romero, 2016). Transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara terbuka dan jujur serta dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan melalui laporan keuangan yang disajikan di situs web pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 yang sekarang sudah dirubah menjadi PP71/2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi keuangan menyatakan bahwa, transparansi yaitu penyampaian informasi keuangan oleh pemerintah kepada masyarakat secara terbuka dan jujur terkait informasi pengelolaan sumber daya daerah (Fajarudin, 2021). Aturan ini diterbitkan agar masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi keuangan dan dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik menegaskan terkait pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik (Ningsih, 2018). Keterbukaan informasi publik ini harus dilaporkan secara berkala kepada publik. Informasi publik ini meliputi laporan keuangan, data kinerja, dan program badan publik.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari tanggung jawab para penyusun laporan keuangan. Menurut Shahan, (2008), tujuan utama pelaporan keuangan yaitu menyampaikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Andriyani, 2020). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, kinerja, dan informasi lainnya yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut. GFOA's Certificate of Achievement Program adalah alat dalam pengukuran kualitas laporan keuangan dan pengungkapan pada sektor pemerintah. Ini diberikan oleh BPK yang dikenal sebagai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Indonesia (Wilopo, 2017). Kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik akan membuat publik mempercayai pemerintah, sehingga pemerintah daerah yang mendapat hasil WTP dari BPK cenderung akan melaporkan laporan keuangan daerahnya. Laporan keuangan daerah yang lengkap dan konsisten dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Nosihana & Yaya, 2016).

Lama Jabatan

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah merupakan pemimpin daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah memegang peran yang krusial dan strategis. Masa jabatan diartikan sebagai jumlah waktu yang dihabiskan seseorang untuk memegang posisi sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Kepala daerah dalam mengambil keputusan cenderung memikirkan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya. Kepala daerah dengan masa jabatan yang lama akan memiliki pemahaman sistem kerja yang mendalam, sehingga dapat mengetahui celah pada sistem kerja di dalamnya dan dapat dimanfaatkannya untuk kepentingan pribadi tanpa mengurangi kinerjanya.

Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah daerah didefinisikan sebagai besar atau kecilnya suatu daerah yang dapat dilihat melalui jumlah aset daerah tersebut (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Jumlah aset yang semakin besar menunjukkan bahwa ukuran pemerintah tersebut juga semakin besar. Pemerintah daerah yang berukuran besar maka pertanggungjawaban dalam pengelolaannya juga semakin besar, sehingga ini memberikan tekanan kepada pihak manajemen dalam melaporkan pengungkapan wajibnya. Akibat dari tekanan ini, pemerintah daerah akan lebih cenderung untuk memberikan informasi yang transparan atas laporan kinerja keuangan dan ini dilakukan agar memperoleh penilaian kinerja yang baik (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

Pengembangan Hipotesis

Kualitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi

Laporan keuangan yang berkualitas baik adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan yang wajar. Pemerintah daerah yang transparan akan laporan keuangannya kepada masyarakat berarti menunjukkan hasil laporan keuangan yang telah dikelolanya sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan (Nosihana & Yaya, 2016). Salah satu hal yang mendorong atau memotivasi pemerintah dalam transparansi laporan keuangan di internet yaitu adanya penghargaan yang diberikan dari pihak eksternal yaitu pemberian opini oleh BPK. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas baik dapat membuktikan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara dengan baik dan transparan. Hasil penelitian Yudistira, Abdul Rohman (2022); Kraih & Mertens, (2020) dan Adiputra et al., (2018), menemukan bahwa kualitas laporan keuangan melalui opini audit memengaruhi terjadinya transparansi Pemerintah Daerah.

H₁: Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap transparansi Pemerintah Daerah melalui website

Lama Jabatan Kepala Daerah terhadap Transparansi

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 kepala daerah memiliki masa jabatan selama 5 tahun (Pranaswati & Kiswanto, 2020). Kepala daerah dapat menjabat paling lama dua periode atau sepuluh tahun. Di Indonesia, kepala daerah memiliki tugas dan wewenang dengan strata tertinggi di tata pemerintahan daerah. Kepala daerah yang sudah lama menjabat dianggap mendapat kepercayaan dari masyarakat yang tinggi. Kepala daerah akan melaksanakan tanggungjawab dan amanah dari masyarakat yaitu mengelola daerah dengan baik dan

melaporkan segala pengelolaan dan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Tavares & da Cruz (2017) menemukan adanya pengaruh antara lama jabatan kepala daerah dengan transparansi pemerintah daerah yang dilakukannya.

H₂: Lama Jabatan Kepala Daerah Berpengaruh terhadap Transparansi Pemerintah Daerah melalui website

Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi

Menurut (Krah & Mertens, 2020) Ukuran Pemerintah daerah memengaruhi terjadinya transparansi Pemerintah Daerah karena 2 faktor yaitu adanya tekanan dari publik untuk memberi informasi terkait sumber daya yang dikelola dan juga dikarenakan banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi sehingga menuntut pemerintah untuk lebih transparan. Berdasarkan Adolpino Nainggolan & Rizki Amalia, (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa besarnya jumlah aset menggambarkan ukuran pemda tersebut. Ukuran pemerintah daerah dengan total aset yang semakin besar maka tanggung jawab pemerintah dalam mengelola laporan keuangan juga semakin kompleks dibanding ukuran pemerintah daerah dengan total aset yang kecil. Hal inilah yang menjadikan pemerintah harus melaksanakan transparansi laporan keuangan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan mengetahui bagaimana penggunaan aset daerah tersebut. Berdasarkan Krah & Mertens, (2020); Wilopo, (2017); Yudistira & Rohman, (2022); dan Rahmawati & Mahmud (2016), yang menghasilkan bahwa ukuran pemerintah daerah secara positif berpengaruh dalam peningkatan transparansi pemerintah daerah.

H₃: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data transparansi yang diperoleh dari website pemda masing-masing, laporan neraca yang di dikeluarkan oleh DJPK, data masa jabatan yang dipublikasi oleh kemendagri dan data Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) semester 1 2024 yang disajikan oleh BPK.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah di Indonesia baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun 2023 yaitu sebanyak 546 pemerintah

daerah. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*. Berikut ini adalah kriteria untuk menentukan sampel dalam penelitian:

Tabel 1. Kriteria Sampel

Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2023	546
Dikurangi:	
Website Pemerintah Daerah tidak bisa diakses	(29)
Tidak tersedianya data berupa Neraca pada Laporan Keuangan yang dipublikasikan DJPK Kementerian Keuangan periode 2023	(0)
Jumlah Sampel	517

Berdasarkan sampel di atas, diperoleh sampel 517 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2023 yang memenuhi kriteria.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Transparansi

Transparansi pemerintahan daerah diartikan sebagai keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah daerah kepada publik, termasuk dalam pengungkapan data keuangan dan non keuangan. Hal ini ditentukan oleh tingkat aksesibilitas situs web pemerintahan daerah. Pengukuran transparansi ini menggunakan indikator dan metode scoring yang dikembangkan oleh (García & García-García, 2010) yang telah disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Pengukuran pengungkapan transparansi dengan indeks *scoring* dengan bobot nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1.

Kualitas Laporan Keuangan

Penyajian Laporan keuangan yang berkualitas merupakan penilaian atas penyusunan dan pelaporan LKPD berdasarkan hasil pemeriksaan audit BPK RI yang diuraikan di hasil opini audit pemerintah daerah. Opini audit itu sendiri merupakan indikator dalam akuntabilitas yang terlihat dalam penyampaian laporan keuangan daerah. Sebagaimana dalam penelitian Trisnawati & Achmad (2014), untuk mengukur kualitas laporan keuangan berdasarkan penilaian opini audit digunakan skala *dummy* dalam pengukuran variabel ini yaitu skor 1 untuk WTP dan 0 untuk Non WTP

Lama Jabatan Kepala Daerah

Lama jabatan kepala daerah yaitu lama tahun menjabat kepala daerah dalam masa pemerintahannya. Seperti dalam penelitian Tavares & da Cruz, (2017), Lama jabatan kepala daerah diukur dengan jumlah lama tahun menjabat kepala daerah terpilih

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintahan daerah adalah variabel yang digunakan untuk menilai sumber daya pemerintahan daerah. Dalam mengukur ukuran pemerintah daerah, total aset digunakan sebagai alat ukur dalam pengukuran variabel ini. Rora (2010) menggunakan Logaritma natural (Ln) total aset sebagai pengganti variabel independen ukuran pemerintahan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dibutuhkan yaitu laporan neraca yang dikeluarkan DJPK Kementerian Keuangan tahun 2023, data masa jabatan kepala daerah yang dipublikasi kemendagri dan opini atas LKPD dari IHPS semester 1 di website BPK RI.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai teknik analisis data. Untuk keseluruhan Teknik analisis menggunakan software SPSS 2025, yang meliputi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F dan uji koefisien determinasi (R²))

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan fenomena data yang dapat dilihat dari nilai mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

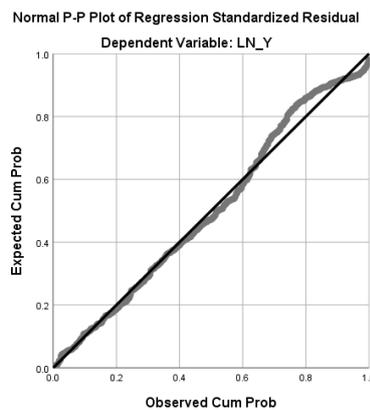
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas LK	517	0	1	.91	.288
Lama Jabatan	517	1	5	4.44	1.190
Ukuran Pemda	517	25.02	34.20	29.0888	.87652
Transparansi	517	.00	14.00	6.8752	3.74355
Valid N (listwise)	517				

Uji Asusmsi Klasi

Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji distribusi data yang akan dianalisis (Bahri, 2018:162). Dalam uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik dan grafik. Untuk uji statistik digunakan uji *one-sample-kolmogorov-smirnov* dengan pengambilan keputusan jika nilai sig > 0,05 maka data dikatakan terdistribusi normal. Untuk uji menggunakan analisis grafik digunakan berupa grafik histogram dan grafik P-Plot. Pada penelitian ini peneliti akan menunjukkan salah satu dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan grafik menggunakan P-Plot:

Tabel 3. Uji Normalitas dengan P-Plot



Pada tabel 3 Hasil menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonal secara rapi dan sejajar, maka dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independent. Penelitian yang tidak terjadi gejala multikolinearitas yaitu apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerace > 0,10. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	Model	Coefficients ^a	
		Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)		
	Opinion		.994 1.006
	Periode		.997 1.003
	Size		.993 1.007

a. Dependent Variable: Transparansi

Berdasarkan tabel 4, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen menghasilkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. sehinggadapat disimpulkan

bahwa dalam model regresi ini multikolinieritas maupun kolerasi antara variabel independen tidak ada.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke observasi lain. Penelitian ini menggunakan *Spearman's rho*, yaitu mengorelasikan variabel independen dengan residualnya. Dengan kriteria jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
		Opinion	Periode	Size	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	Opinion	Correlation Coefficient	1,000	-0,028	.091*	0,012
		Sig. (2-tailed)		0,522	0,040	0,779
		N	517	517	517	517
	Periode	Correlation Coefficient	-0,028	1,000	0,005	0,026
		Sig. (2-tailed)	0,522		0,906	0,556
		N	517	517	517	517
	Size	Correlation Coefficient	.091*	0,005	1,000	-0,001
		Sig. (2-tailed)	0,040	0,906		0,981
		N	517	517	517	517
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0,012	0,026	-0,001	1,000	
	Sig. (2-tailed)	0,779	0,556	0,981		
	N	517	517	517	517	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *spearman's rho*, menunjukkan korelasi antara variabel kualitas laporan keuangan, masa jabtan dan ukuran pemerintah dengan nilai unstandardized residual memiliki nilai signifikansi (sig. 2-tailed) > 0,05 yaitu Sig. (2-tailed) kualitas laporan keuangan sebesar 0,779, lama jabatan kepala daerah sebesar 0,556 dan ukuran pemerintah daerah sebesar 0,981. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Linear Berganda

Tabel 6. Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-21.089	5.230		-4.033	.000
	Opinion	2.861	.548	.220	5.225	.000
	Periode	-.010	.132	-.003	-.074	.941
	Size	.873	.180	.205	4.856	.000

a. Dependent Variable: Transparansi

Berdasarkan tabel 6 pada kolom *unstandardized coefficients*, diperoleh model persamaan regresi linear berdanda, yaitu:

$$Y = -21.089 + 2.861\text{Opinion} - 0.010\text{Periode} + 0.873\text{Size} + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji Simultan F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara simultan atau bersama-sama dengan hipotesis yang diajukan taraf sig. 0,05. Jika tingkat sig. < 0,05, maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel secara simultan, begitupun sebaliknya. Berikut tabel hasil uji F:

Tabel 7. Uji Simultan F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	699.881	3	233.294	18.324	.000 ^b
	Residual	6531.447	513	12.732		
	Total	7231.328	516			

a. Dependent Variable: Transparansi

Berdasarkan tabel 6., dapat diketahui nilai signifikannya yaitu 0,000. Ini berarti nilai sig. 0,000 < 0,05, yangmana artinya bahwa kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah secara simultan.

Determinasi Koefisien (R²)

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk melihat kemampuan dan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen. Hasil koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Determinasi Koefisien

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.311 ^a	.09	.092	3.56817

a. Predictors: (Constant), Size, Periode, Opinion

Berdasarkan tabel 7. nilai Adjusted R Square diketahui sebesar 0,092 ini berarti menunjukkan bahwa pengaruh kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan ukuran pemerintah sebesar 9,2%, sedangkan 90,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikan $< 0,05$, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen begitupun sebaliknya.

Tabel 9. Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	-21.089	5.230		-4.033	.000
Opinion	2.861	.548	.220	5.225	.000
Periode	-.010	.132	-.003	-.074	.941
Size	.873	.180	.205	4.856	.000

a. Dependent Variable: Transparansi

Berdasarkan hasil uji variabel kualitas laporan keuangan diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000. Berarti nilai sig. $0,000 < 0,05$. Dengan demikian berarti H1 diterima dan artinya secara parsial kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi. Berdasarkan hasil uji variabel lama jabatan kepala daerah diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,941. Ini berarti nilai sig. $0,941 > 0,05$. Dengan demikian berarti H2 ditolak, dan artinya secara parsial lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi. Berdasarkan hasil uji variabel ukuran pemerintah daerah diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig. $0,000 < 0,05$. Dengan demikian bahwa H3 diterima, yang berarti secara parsial ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi.

Pembahasan

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pemerintah Daerah melalui Website

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H₁ menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah melalui website. Kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk bahwa pemerintah daerah telah melakukan pelaporan keuangan daerah dengan baik. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

merupakan opini terbaik yang diterima oleh pemerintah daerah, dimana pemda telah menyajikan laporan keuangan secara wajar tidak terjadi salah saji. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan hasil yang baik dan dipercaya dalam pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan yang semakin baik maka informasi yang diungkapkan di website juga semakin baik.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi, ketika pemerintah mendapat opini audit terbaik dari BPK, ini akan mendorong pemerintah dalam melaksanakan transparansi. Hasil opini yang baik yang disampaikan melalui website dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah melalui opini audit laporan keuangan tersebut. Hasil ini juga sejalan dengan teori signal, perolehan opini WTP dari BPK atas kinerja pemerintah daerah menjadi sebuah sinyal yang positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah berupaya untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan informasi keuangan pemerintah daerah dengan mempublikasikannya melalui situs web pemda masing-masing. Hal ini sejalan dengan penelitian Yudistira, Abdul Rohman (2022); Krah & Mertens, (2020) dan Adiputra et al., (2018) dengan hasil penelitian yang diperolehnya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan melalui hasil opini audit memengaruhi dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah di Indonesia.

Pengaruh Lama Jabatan Kepala Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah melalui Website

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa lama jabatan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Kepala pemerintah yang telah lama menjabat tidak menjamin akan melakukan transparansi laporan keuangan pemerintah ke website pemerintah bahkan dapat menurunkan tingkat transparansi. Kepala daerah dengan masa jabatan yang lama memiliki pemahaman informasi yang mendalam, sehingga dapat mengetahui celah didalamnya dan dapat dimanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Baik kepala daerah yang baru menjabat atau telah lama menjabat jika telah merasa aman dan dipercaya oleh publik berisiko mengabaikan prinsip transparansi laporan keuangan. Hasil ini bertolak belakang dengan teori agensi. Dengan demikian, lama jabatan kepala daerah tidak menjadi dasar pemerintah melaksanakan transparansi laporan keuangan kepada publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Valentina & Kiswanto (2020) dan Gabriel & Castillo, (2020) yang menyatakan bahwa lamanya masa jabatan kepala daerah tidak memengaruhi tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemda.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah melalui Website

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Temuan ini memperlihatkan bahwa total aset yang dikelola pemerintah daerah berkorelasi langsung dengan kebutuhan masyarakat akan transparansi keuangan daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka total aset yang dimiliki suatu daerah juga semakin besar, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan transparansi. Semakin kompleks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka tanggungjawab pemerintah dalam penyampaian informasi keuangan semakin besar. Pemerintah memiliki lebih banyak informasi terkait aset daerah daripada masyarakat. Hal ini yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Hasil ini sejalan dengan teori agensi, dengan aset yang besar ini menyebabkan masyarakat harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan karena khawatir akan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam upaya mengurangi asimetri informasi terhadap tuntutan dari masyarakat, pemerintah daerah melakukan transparansi secara lengkap melalui situs webnya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui hasil pengelolaan pemerintah daerah terhadap sumber daya milik daerah. Selain itu, kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah juga akan meningkat.

Begitupun berdasarkan teori *signalling* dimana laporan keuangan ini menjadi sinyal informasi yang diberikan pemerintah kepada publik (Wilopo, 2017). Sinyal yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu berupa publikasi laporan keuangan kepada publik melalui situs website pemda. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan aset daerah untuk kepentingan publik, sehingga pemerintah juga harus melaporkan hasil pengelolaan aset daerah kepada masyarakat agar mereka dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan agar tidak ada terjadinya penyalahgunaan dana atau tindak korupsi. Dengan demikian, semakin baik kinerja pemerintah daerah, maka semakin transparan pemerintah daerah melaporkan laporannya (Nosihana & Yaya, 2016). Sejalan dengan penelitian Yudistira & Rohman, (2022); Hasibuan & Muid, (2021) dan Suci Novalia (2023), yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memengaruhi pelaksanaan transparansi pemerintahan daerah melalui website.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan, lama jabatan dan ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah. Sedangkan variabel lama jabatan tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Berdasarkan nilai adjusted R Square dalam penelitian ini sebesar, 9,2% sedangkan sisanya 90,8% berada pada variabel lain diluar penelitian ini. Sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambah variabel independent lainnya seperti belanja modal pemerintah, kekuatan politik, rasio pembiayaan hutang, dana alokasi daerah, dan tekanan eksternal untuk memperkuat hasil penelitian. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan transparansi pemerintah daerah di website agar masyarakat dapat mengetahui segala informasi dan mengawasi pemerintah daerah. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu terdapat beberapa website pemerintah kabupaten/kota yang tidak dapat diakses dalam rentan waktu 2 minggu penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Adolpino Nainggolan, & Rizki Amalia. (2019). Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Kap Di Wilayah Jakarta Barat). *Jurnal Liabilitas*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v4i2.52>
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedo-Romero, F. (2016). Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4), 327–347. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p07>
- Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 659–668.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. 4(December), 180–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Gabriel, A. G., & Castillo, L. C. (2020). Transparency and Accountability Practices of Local

- Government Units in the Philippines: a Measurement from the Ground. *Public Organization Review*, 20(3), 437–457. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00450-8>
- García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities. *Local Government Studies*, 36(5), 679–695. <https://doi.org/10.1080/03003930.2010.506980>
- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi AkruaL Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275–291. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21502>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Krah, R. D. Y., & Mertens, G. (2020). Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-first Century. *State and Local Government Review*, 52(3), 200–213. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Lestari, E. P., & Rahardjo, S. N. (2020). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018. 9(56), 1–13.
- Martani, D., Fitriyari, D., & Annisa. (2014). Financial and performance transparency on the local government websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 60(3), 504–516.
- Mutmainnah, S., Nor, W., & Helmina, M. R. A. (2023). Determinan tingkat transparansi anggaran melalui website pemerintah provinsi di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 191–199. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art22>
- Ningsih, R. F. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(2), 1–19.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). *Financial statements disclosure on Indonesian local government websites A quest of its determinant (s)*. 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. 3(2), 95.
- Novalia, S., & Deviani, D. (2023). Pengaruh Demokrasi, Kekuatan Politik dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 127–140. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.636>
- Novananda, R., Hasibuan, F., & Muid, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pemerintah (Wilayah Provinsi Di Pulau Jawa). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nurhadianto, T., & Sugiri, S. (2022). *Transparency of Local Financial Management: Evidence*

from Local Governments in Indonesia. 50–70.

- Pradita, K. D. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87–100.
- Pranaswati, H. V., & Kiswanto. (2020). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 273–289. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2862>
- Rosalia, R., & Zulkarnain, P. D. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Potensi Daerah dan Aset Daerah terhadap Transparansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 167–176. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i2.375>
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Taufik, M. G., & Bandi, B. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah Dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.177>
- Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites through a political market framework. *Government Information Quarterly*, 37(3), 0–27. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005>
- Verawaty, V. (2017). Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 92–107. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.172>
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78)
- Yudistira, A. R. (2022). *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019)*. 11(01), 1–10.
- Yustikasari. (2018). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah da.pdf. *Jurnal Riset Akutansi Terpadu*, 11(1), 28–44.